



LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Website : www.pn-gresik.go.id / email : gresik.pn@gmail.com

Telp. (031) 51159931 – Fax. (031) 51159931

Jl. Raya Permata No. 06 Gresik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT, kami dapat menyelesaikan tugas dengan membuat laporan kegiatan tahunan dalam lingkup peradilan umum dalam satuan kerja (Satker) pada Pengadilan Negeri Gresik yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok: memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu kami telah dapat menyusun laporan kegiatan tahunan untuk tahun anggaran 2021.

Penyusunan laporan kegiatan tahunan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2876 /SEK/OT.01.1/12/2022, tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 laporan ini bermaksud sebagai tolok ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Gresik dalam Tahun Anggaran berjalan apakah sudah dilaksanakan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

Demikian laporan kegiatan tahunan tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tugas selama satu tahun, semoga dapat dijadikan acuan untuk tahun yang akan datang dan akhirnya kami ucapkan terima kasih

Gresik, 17 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik


AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H.M.Hum &
NIP. 19690818 199202 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gresik	2
C. Rencana Strategis	3
BAB II KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA	5
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	5
B. Penyelesaian Perkara	6
1. Jumlah Perkara yang diputus	6
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	6
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK	7
4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Mediasi	7
5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi	8
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	8
1. POSBAKUM	10
2. Sidang Keliling/ Pelanan Terpadu	11
3. Perkara Prodeo	11
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	13
1. Mutasi	17

	2. Promosi Jabatan	20
	3. Pensiun	23
	4. Diklat	23
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
	A. Pengelolaan Keuangan	29
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	31
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	37
	1. Perangkat Keras	37
	2. Perangkat Lunak	42
	3. Implementasi e- court	54
	4. Implemetasi SIPP	55
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN	57
	1. Akreditasi Penjamin Mutu	57
	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	64
	3. Inovasi Pelayanan Publik	65
BAB VI	PENGAWASAN	71
	A. Internal	71
	B. Evaluasi	74
BAB VII	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Rekomendasi	75
	LAMPIRAN- IAMPIRAN	77

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan laporan kegiatan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan kegiatan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Gresik sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” - sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Gresik telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan ;
2. Kebijakan peradilan ;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran ;
4. Penyelenggaraan persidangan ;
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan ;
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau ;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan ;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di bidang administrasi teknis dilaksanakan oleh aparatur teknis yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di bidang administrasi umum dilaksanakan oleh aparatur non teknis yudisial yaitu Sekretaris, Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanaan, dan Subbag Umum dan Keuangan.

Dalam menyusun Laporan Tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi fisik gedungnya dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada antara lain keterbatasan personil, ruang dan fasilitas lainnya. Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk dibenahi dan ditingkatkan dengan cara penataan dan menjaga kebersihan kantor, ketertiban budaya kerja pegawai dan penataan administrasi menjadi lebih baik, tertib, rapi dan teratur. Di samping itu dalam hal peningkatan proses penanganan perkara ditargetkan proses penyelesaiannya tidak lebih dari 5 (lima) bulan setelah proses mediasi dinyatakan gagal dengan tidak mengesampingkan kualitas isi putusan.

Sasaran akhir dalam laporan tahunan ini adalah keadaan kantor dan Administrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan, yaitu:

- a. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI GRESIK

Visi adalah cita – cita yang ingin diraih atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gresik.

Visi Pengadilan Negeri Gresik mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gresik Yang Agung”

Misi adalah cara/ strategi mencapai cita – cita atau sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gresik:


1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gresik.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gresik
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Gresik

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah (5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan *Blueprint* (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan.

Untuk membangun kembali sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa, dalam wujud peradilan yang bersih, adil, benar, jujur dan netral maka perlu merencanakan langkah- langkah dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menentukan rencana strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme kerja aparat peradilan dalam rangka mewujudkan Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
 - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
 - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Access To Justice)
 - Peningkatan kualitas pengawasan.
 - Peningkatan pelayanan informasi publik.
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur di Pengadilan Negeri Gresik
Pembinaan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Gresik (Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai) harus ditingkatkan lagi dengan cara peningkatan pengetahuan (tingkat pendidikan aparatur peradilan baik pendidikan formal maupun non formal).
3. Meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja bagi aparat peradilan khususnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam rangka



memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, cermat, efisien, efektif, produktif, benar dan adil dan transparan.

4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui pengembangan Teknologi Informasi sebagai alat bantu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB II KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELA IA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gresik pada tahun 2022 berdasarkan data pada SIPP Pengadilan Negeri Malang (data per 31 Desember 2022) dapat digambarkan pada matrik keadaan perkara berikut:

Tabel 1.1 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2021	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2022	PUTUS 2022	CABUT	SISA 2022	% PENYEL ESAIAN
1	Pidana Biasa	40	400	363	0	80	82%
2	Pidana Singkat	0	1	1	0	0	100%
3	Pidana Cepat/Ringan	0	118	118	0	0	100%
4	Pidana Lalu Lintas	0	11140	11140	0	0	100%
5	Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	0	0	0%
6	Pidana Khusus Anak	0	5	5	0	0	100%
7	Pidana Praperadilan	0	4	4	0	0	100%

Tabel 1.2 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2021	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2022	PUTUS 2022	CABUT	SISA 2022	% PENYELESAIAN
1	Perdata Gugatan	36	110	103	7	36	75%
2	Perdata Permohonan	7	227	225	6	3	98%
3	Perdata Khusus Niaga Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perdata Khusus Niaga PKPU	0	0	0	0	0	0
5	Perdata Khusus Niaga HKI	0	0	0	0	0	0
6	Perdata Khusus Niaga Actio Pauliana	0	0	0	0	0	0
7	Perdata Khusus Niaga Lain	0	0	0	0	0	0
8	Perdata Khusus PHI	2	21	22	0	1	95%
9	Perdata Perlawanan (Bantahan)	0	4	4	0	0	100%

10	Perdata Gugatan Sederhana	0	15	14	0	1	93%
11	Perdata Eksekusi	48	12	2	1	9	5%
12	Perdata Konsinyasi	0	1	1	0	0	100%

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sumber data: SIPP Pengadilan Negeri Gresik (data per 31 Desember 2022)

Dari Sisa Perkara perkara yang belum diputus tahun 2021 sebanyak 85 perkara. Sampai akhir tahun 2022, 72 perkara telah putus dan minutasi. Sehingga sisa perkara yang belum putus dan minutasi sebanyak 13 perkara.

Tabel 1.3 Jumlah Sisa Perkara Tahun 2021 Yang Diputus Tahun 2022

NO	PERKARA	Sisa Perkara Tahun 2021	Sisa Perkara Tahun 2021 yang Diselesaikan Tahun 2022	SISA	KETERANGAN
1	PERDATA	43	30	13	Pdt.G, Pdt.P, Pdt.Bth,
2	PIDANA	40	40	0	Pid.B, Pid.S, Pid.C, Pid.LL, Pid.Sus-Anak, Pid.Pra
3	PHI	2	2	0	Pdt.Sus-PHI
	JUMLAH	85	72	13	

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan; disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Dimana ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

Tabel 1.4 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022 (Maksimal 5 Bulan)

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2021	PERKARA MASUK TAHUN 2022	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA	KETERANGAN
1	PERDATA	43	353	266	47	PDT G, PDT GS, PDT P, PDT.Bth
2	PIDANA	40	400	350	80	Pid.Biasa, Pid.Sus-Anak
3	PHI	2	21	20	1	Pdt.Sus-PHI
	JUMLAH	85	768	670	128	

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

Tabel 1.5 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

NO	PERKARA	PUTUS TAHUN 2022	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM			KETERANGAN
			BANDING	KASASI	PK	
1	PERDATA	328	471	478	472	
2	PIDANA	360	96	76	20	
3	PHI	22	0	16	0	
	JUMLAH	710	567	570	493	

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Gresik, jumlah perkara pidana (non lalu lintas) yang tidak diajukan upaya hukum Banding mencapai 96 perkara dari 360 perkara yang telah putus di tahun 2022. Sedangkan untuk perkara perdata, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding mencapai 471 dari 328 perkara yang telah putus di tahun 2022, dan untuk perkara PHI, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding mencapai 0 dari 22 perkara yang telah putus di tahun 2022

Sehingga jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 sebanyak 710 perkara.

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Gresik, jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada tahun 2022 adalah 11 perkara dari 67 perkara yang telah dilakukan keputusan mediasi.

Tabel 1.5 Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

NO	NAMA SATUAN KERJA	MEDIASI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN GRESIK KELAS 1 A	11	67	Berhasil dengan Akta perdamaian : 8 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 3 Gagal (Tidak Berhasil) : 67 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 0

5. Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi

Tabel 1.6 Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi

NO	NAMA SATUAN KERJA	DIVERSI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN GRESIK KELAS 1A	5	0	Berhasil dengan Akta perdamaian :5 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 0 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Yogyakarta, 14 September 2016 bertempat di Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik untuk pertama kalinya mendapat penghargaan Akreditasi PMPN (Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri) dan ISO 9001:2015 dari Dirjen Badilum (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan predikat A (Excellent) Penghargaan Akreditasi ini di berikan langsung oleh Bpk. H. Suwardi, SH., MH. selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI (Bidang Non Yudisial), dan di terima oleh Ketua Pengadilan Negeri/Hub Industrial Gresik yaitu Bpk. Lucas Prakoso, SH.,M. Hum periode 10 Febuari 2016 s.d 25 November 2021

Berikutnya pada tanggal 9 Desember 2022 dengan Ketua Bapak Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum kembali Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mendapatkan penghargaan dengan predikat A yang di kirim langsung dari Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI.

Seritifikat ini diberikan dengan tujuan saat itu agar mendorong pengadilan negeri sebagai ujung tombak penyelesaian hukum untuk menciptakan suatu kondisi peradilan yang modern, kredibel, akuntabel, dan transparan.



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DAN IA
TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS
DAN IA TAHUN 2022.

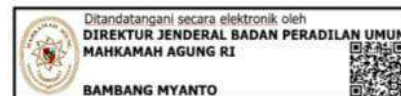
KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Negeri kelas IA Khusus dan IA berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir
dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022



Kepada :

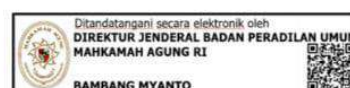
Ketua Pengadilan Negeri Gresik




- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	TIPE	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 72	dst.				
73	Pengadilan Negeri Gresik	IA	722	725	A
74 s/d 98	dst.				



 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

Gambar 1.1 Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Gresik

1. POSBAKUM (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

- Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri/Hub Industrial Gresik mendapatkan alokasi anggaran/ Pagu Sebesar Rp. 31.200.000,- untuk Realisasi sebesar Rp. 31.200.000,-

2. Sidang Keliling/Pelayanan terpadu

Sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Negeri tersebut sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Akan tetapi untuk Tahun 2022 Pengadilan Negeri Gresik tidak melaksanakan sidang keliling karena tidak memiliki anggaran maupun ziting plaats untuk melaksanakan sidang keliling.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan

gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/ yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

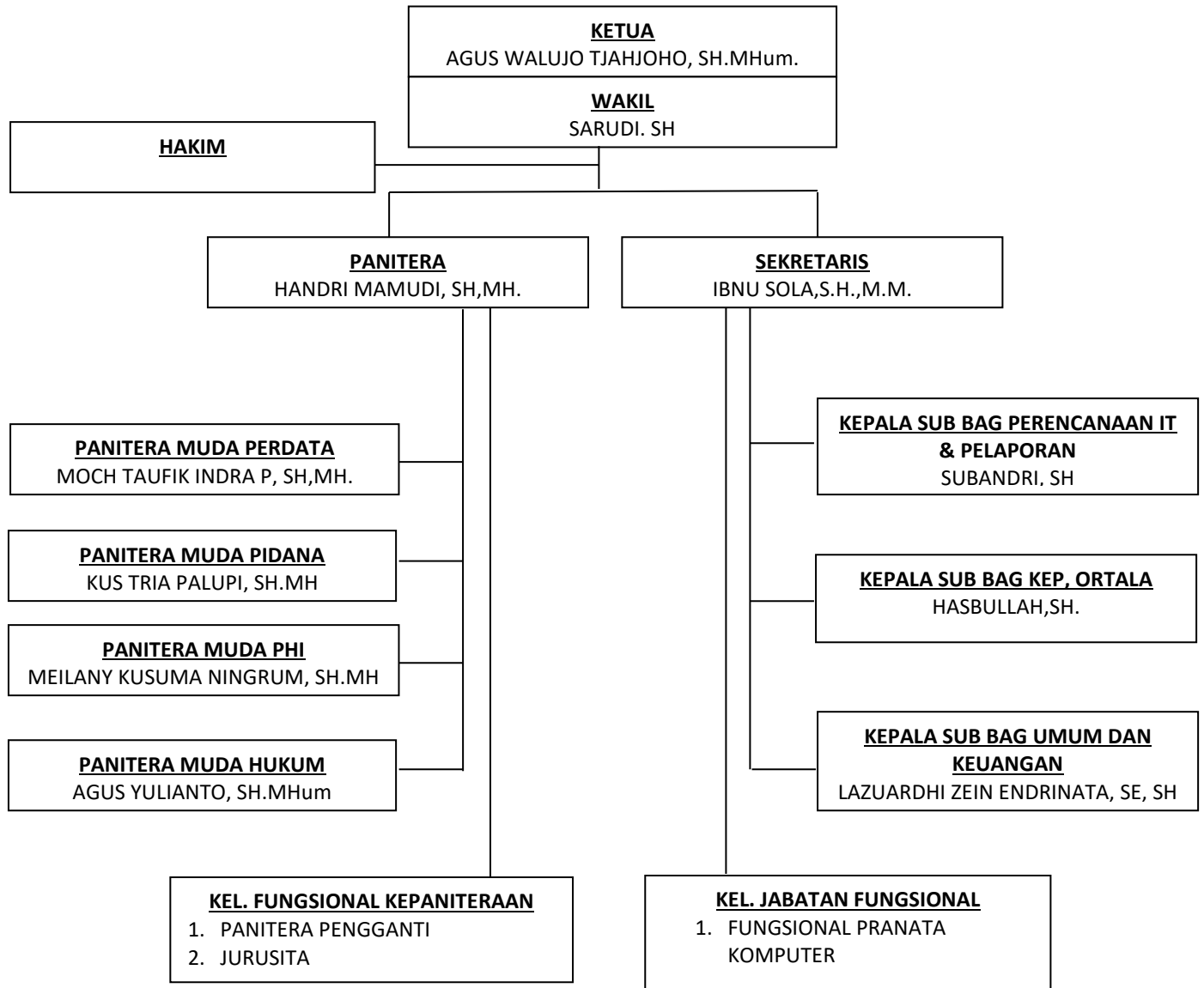
- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

A. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu Keterampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Pada saat Tahun 2022 kekuatan personil pegawai Pengadilan Negeri Gresik berjumlah 56 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Jumlah Pegawai Per 30 desember sebanyak 56 orang terdiri:

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai

Golongan	Hakim	Hakim Ad-Hoc PHI	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Panitera Pengganti	Jurusita/Jurusita Pengganti	Staf	Jumlah
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	6	-	-	-	-	-	-	6
IV/b	3	-	2	-	-	-	-	5
IV/a	10	-	2	-	3	-	-	15
III/d	-	-	4	-	3	-	-	7
III/c	-	-	-	-	3	1	1	5
III/b	-	-	1	-	-	-	-	1
III/a	-	-	-	1	-	-	6	7
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	-	6	6
II/b	-	-	-	-	-	1	-	1
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	3	9	1	9	2	13	56

Tabel 3.2 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	*Keterangan
1	AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum. 196908181992031002	Ketua	
2	SARUDI,S.H. 196705091996031004	Wakil Ketua	
3	AGUNG CIPTOADI,S.H.,M.H, 196811131996031001	Hakim	
4	RINA INDRAJANTI, S.H., M.H. 19691029 199603 2 001	Hakim	
5	SRI HARIYANI, S H., M H. 196912111996032001	Hakim	
6	ETRI WIDAYATI, S.H., M.H. 19650517 198502 2 001	Hakim	
7	FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. 19771022 201112 2 001	Hakim	
8	EFRIDA YANTI, S.H., M.H 19770327 200112 2 001	Hakim	
9	AGUNG NUGROHO SURYO S, S.H., M. Hum 19760207 200112 1 003	Hakim	
10	ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H. 19760306 200212 2 001	Hakim	
11	MOCH. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H. 19770527 200212 1 004	Hakim	
12	ARI KARLINA, S.H., M.H. 19800805200212 2 001	Hakim	
13	SRI SULASTUTI, S H. 19770924 200212 2 003	Hakim	
14	FIFIYANTI, S.H., M.H. 19771031 200212 2 007	Hakim	
15	RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.H. 19771122 200212 2 001	Hakim	
16	ARNI MUFIDA THALIB, SH, MH. 19790524 2003122 001	Hakim	
17	BAGUS TRENGGONO, S.H., M.H. 19770507 200312 1 001	Hakim	
18	ANAK AGUNG AYU CHRISTIN A, S.H. M.H 19790817 200502 2 003	Hakim	
20	HANDRI MAMUDI,S.H.,M.H. 19710409 199803 1 005	Panitera	
21	JAKA MULYATA,S.H.,M.M.,M.H. NIP.196206090220121202	Hakim Ad-Hoc PHI	

22	ABDI MUNAWAR DAENG M,S.Sos.,S.H.,M.H. NIP.197808070220160202	Hakim Ad-Hoc PHI	
23	WENDY AGUS BUDIAWAN,S.H.,M.H. NIP.198508280220160207	Hakim Ad-Hoc PHI	
24	IBNU SOLA,S.H.,M.M. 19670907 199303 1 001	Sekretaris	
25	AGUS YULIANTO, S.H., M.Hum. 19680817 199603 1 004	Panitera Muda Hukum	
26	MOCH TAUFIK INDRA P, S.H., M.H. 19851014 200912 1 005	Panitera Muda Perdata	
27	KUS TRIA PALUPI, S.H., M.H. 19750628 199403 2 001	Panitera Muda Pidana	
28	MEILANY KUSUMA NINGRUM, S.H. 19810526 200704 2 001	Panitera Muda PHI	
29	ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H. 19650825 199203 1 005	Panitera Pengganti	
30	DWI WINDAYATI, S.H., M.H. 19640502 199203 2 003	Panitera Pengganti	
31	Dra SRIE SULANDJARI 19621222 198602 2 001	Panitera Pengganti	
32	AKBARUR RAIHAN, SH 19760601 200604 1 005	Panitera Pengganti	
33	SISWANTO, S.H. 19730209 200112 1 001	Panitera Pengganti	
34	DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H. 19821112 200904 2 004	Panitera Pengganti	
35	DEDIK WANDONO,S.H. 198308022006041003	Panitera Pengganti	
36	ZULFIKAR NUR BARLIAN,S.H. 19860206 201212 1 001	Panitera Pengganti	
37	INDAH WARDAH, S.H. 19820904 200604 2 005	Panitera Pengganti	
38	SUBANDRI, S.H 19641222 199303 1 002	Kasubbag PTIP	
39	HASBULLAH,S.H. 19790516 201408 1 003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
40	LAZUARDHI ZEIN ENDRINATA, S.E., S.H. 19780531 200502 1 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	
41	SUPRIYONO, S.H. 19680622 199303 1 005	Jurusita	
42	KUSWANDI 19830826 201408 1 001	Jurusita Pengganti	
43	NURROSO 19710109 201408 1 001	Jurusita Pengganti	

44	DYAH AYU ROSITA DEWI, S.H. 19760429 200604 2 002	Analisis Perkara Peradilan	
45	FENIK ANDRIYAS MEGA SAFUTRI 19890927 200912 2 001	Bendahara	
46	SATRYO WICAKSONO, S.T. 19921101 201903 1 004	Pranata Komputer Ahli Pertama	
47	ADELIA FEBRIANTI, S.Sos. 19930218 201903 2 010	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
48	ANITA PUJI LESTARI, A.Md. 19890929 202012 2 003	Pengadministrasi Register Perkara	
49	ANASTASIA MANIK, A.Md. 19930316 202012 2 007	Pengelola Sistem dan Jaringan	
50	MEIRISA YUNITA, S.H. 19940530 202203 2 011	Analisis Perkara Pera dilan	
51	ERINA RATNA BIDARI, S.H. 19950624 202203 2 001	Analisis Perkara Peradilan	
52	M.RISYAH FARRAS DEKA MAGHFIRA, S.H. 19961218 202203 1 007	Analisis Prerkara Peradilan	
53	SYINTHIA ROSA NAIBAHO, A.Md. 19960604 202203 2 009	Pengelola Perkara	
54	FRISKA ROSALINA, A.Md. 19930403 202203 2 013	Pengelola Barang Milik Negara	
55	RAFIKA LORENA, A.Md. 19960325 202203 2 009	Pengelola Perkara	
56	MEYTI AGNESTA SEMBIRING, A.Md. 19930515 202203 2 009	Pengelola Perkara	

1. MUTASI

MUTASI MASUK

Tabel 3.3 Mutasi Masuk

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT NO. & TGL
1	AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum	KETUA	WAKIL KETUA PN BALIKPAPAN	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27/KMA/SK/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022

2	HANDRI MAMUDI, S.H.,M.H.	PANITERA	PANITERA PN GORONTALO	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 50/KMA/SK/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022
3	DEDIK WANDONO, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PANITERA PENGGANTI PN TULUNGAGUNG	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 52/KMA/SK/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022
4	RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.H	HAKIM	HAKIM PN SLEMAN	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 62/KMA/SK/II/2022 Tanggal 25 Februari 2022
5	M.AUNUR ROFIQ, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN MUARA TEWEH	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 149/KMA/SK/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022
6	WENDY AGUS BUDIAWAN, S.H., M.H.	HAKIM AD HOC	HAKIM AD HOC PN MANADO	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 150/KMA/SK/II/2022 Tanggal 17 Mei 2022
7	ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PANITERA PRNGGANTI PN PROBOLINGGO	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2443/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 Tanggal 27 Oktober 2022
8	MOCH TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PERDATA	PANITERA MUDA PERDATA PN LAMONGAN	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2443/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 Tanggal 27 Oktober 2022
9	SARUDI, S.H.	WAKIL KETUA	KETUA PN MOJOKERTO	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 Tanggal 11 November 2022
10	SRI HARIYANI,S.H.,M.H.	HAKIM	HAKIM PN MALANG	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 Tanggal 11 November 2022

MUTASI KELUAR

Tabel 3.4 Mutasi Keluar

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT NO. & TGL
1	WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI PT BANJARMASIN	KETUA PN GRESIK	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 26/KMA/SK/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022
2	EDDY, S.H.	HAKIM PN MAKASSAR	HAKIM PN GRESIK	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27/KMA/SK/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022
3	RINI SUSANTI, S.E., S.H.	PANITERA PENGGANTI PN TUBAN	JURUSITA PENGGANTI PN GRESIK	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 52/KMA/SK/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022
4	JINO, S.H., M.H.	JURUSITA PN SURABAYA	JURUSITA PN GRESIK	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 52/KMA/SK/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022
5	ATING BUDIMAN, S.H., M.H.	PANITERA PN SLEMAN	PANITERA PN GRESIK	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 50/KMA/SK/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022
6	NURWONO, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM PN BLITAR	PANITERA PENGGANTI PN GRESIK	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51/KMA/SK/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022
7	ANDI WILSAN, S.T	SEKRETARIS PN KAB MADIUN	KASUB BAG KEPEGAWAIAN PN GRESIK	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 203/SEK/Kp.I/SK/II/2022 Tanggal 9 Februari 2022
8	MUHLIS, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA PN TUBAN	PANITERA PENGGANTI PN GRESIK	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 154/KMA/SK/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022
9	AHMAD TAUFIK, S.H.	HAKIM PN CIBINONG	HAKIM PN GRESIK	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022

10	SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H., M.H.	PANITERA PN PASURUAN	PANITERA MUDA PERDATA PN GRESIK	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2439/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022
11	SUGIANNUR, S.H.	WAKIL KETUA PN MUARA TEWEH	HAKIM PN GRESIK	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 Tanggal 11 November 2022
12	I.A. SRI ADRIYANTHI A.W., S.H., M.H.	KETUA PN MIJOKERTO	WAKIL KETUA PN GRESIK	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 Tanggal 11 November 2022

2. PROMOSI JABATAN

Tabel 3.5 Promosi Jabatan

NO	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	PROMOSI MENJADI	SK PEJABAT NO. & TGL
1	WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.	KETUA PN GRESIK	HAKIM TINGGI PT BANJARMASIN	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 26/KMA/SK/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022
2	RINI SUSANTI,S.E.,S.H.	JURUSITA PENGGANTI	PANITERA PENGGANTI	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 52/KMA/SK/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022
3	NURWONO,S.H.,M.H.	PENITERA PENGGANTI	PANITERA MUDA HUKUM PN BLITAR	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51/KMA/SK/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022
4	ANDI WILSAN,S.T.	KASUBBAG KEPEG & ORTALA	SEKRTARIS PN KAB.MADIUN	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 203/SEK/Kp.I/SK/II/2022 Tanggal 9 Februari 2022
5	MUHLIS,S.H.	PANITERA PENGGANTI	PANITERA MUDA PERDATA PN TUBAN	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 154/KMA/SK/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022

6	SUGENG AGUNG SISWOYO,S.H.,M.H.	PANMUD PERDATA	PANITERA PN PASURUAN	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2439/DJU/SK/KP.04.5/10/202 2 Tanggal 14 Oktober 2022
7	I.A SRI ADRIYANTHI A.W,S.H.,M.H.	WAKIL KETUA	KETUA PN MOJOKERTO	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/202 2 Tanggal 11 November 2022
8	SUGIANNUR,S.H.	HAKIM	WAKIL KETUA PN MUARA TEWEH	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/202 2 Tanggal 11 November 2022

KENAIKAN PANGKAT

Tabel 3.6 Kenaikan Pangkat

No.	Nama	Jabatan	TMT	Usul
1	I.A.SRI ADRIYANTI A.W., S.H., M.H.	Wakil Ketua	01-04-2022	IV/b-IV/c
2	ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.	Hakim	01-04-2022	IV/b-IV/c
3	FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.	Hakim	01-04-2022	IV/a-IV/b
4	EFRIDA YANTI, S.H., M.H.	Hakim	01-04-2022	IV/a-IV/b
5	AGUNG NUGROHO S.S., S.H., M.H.	Hakim	01-04-2022	IV/a-IV/b
6	AHMAD TAUFIK	Hakim	01-04-2022	IV/a-IV/b
7	HANDRI MAMUDI, S.H., M.H.	Panitera	01-04-2022	IV/a-IV/b
8	SUPRAYITNO	Sekretaris	01-04-2022	IV/a-IV/b
9	SUGIANNUR, S.H	Hakim	01-04-2022	III/d-IV/a
10	AKBARUR RAIHAN, S.H., M.H	Panitera Pengganti	01-04-2022	III/d-IV/a
11	MUHLIS, S.H.	Panitera Pengganti	01-04-2022	III/c-III/d
12	INDAH WARDAH, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	01-04-2022	III/b-III/c

KENAIKAN GAJI BERKALA

Tabel 3.7 Kenaikan Gaji Berkala

No.	Nama	Jabatan	TMT
1	ETRI WIDAYATI,S.H.,M.H.	Hakim	01-02-2022
2	NURWONO,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	01-02-2022
3	AGUNG CIPTOADI,S.H.,M.H.	Hakim	01-03-2022
4	RINA INDRAJANTI,S.H.,M.H.	Hakim	01-03-2022
5	HANDRI MAMUDI,S.H.,M.H.	Panitera	01-03-2022
6	AGUS YULIANTO,S.H.,M.Hum.	Panitera Muda Hukum	01-03-2022
7	ROSA AGUS TAMDANI,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	01-03-2022
8	SUGIANNUR,S.H.	Hakim	01-04-2022
9	AKBARUR RAIHAN,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	01-04-2022
10	ANDI WILSAN,S.T.	Kasubbag Kepegawaian & ORTALA	01-04-2022
11	ENI MARTININGRUM,S.E.S.H.,M.H.	Hakim	01-12-2022
12	MOCH FATKUR ROCHMAN,S.H.,M.H.	Hakim	01-12-2022
13	ARI KARLINA,S.H.,M.H.	Hakim	01-12-2022
14	SRI SULASTUTI,S.H.	Hakim	01-12-2022
15	RATNA MUTIA RIANI,S.H.,M.H.	Hakim	01-12-2022
16	FIFIYANTI,S.H.,M.H.	Hakim	01-12-2022
17	FENIK ANDRIYAS MEGA SAFUTRI,S.H.	Bendahara	01-12-2022
18	ANASTASIA MANIK,A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	01-12-2022

19	ANITA PUJI LESATARI,A.Md.	Pengadministrasi Register Perkara	01-12-2022
----	---------------------------	--------------------------------------	------------

3. Pensiun

Tabel 3.8 Pensiun

NO	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT NO. & TGL
1	SUSILA DWI RIAN TO,SH.	Panitera Pengganti	01-12-2022	SEKRETARIS MA RI NO.00668/13001/AZ/08/22 TGL 15 AGUSTUS 2022

4. DIKLAT (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Tabel 3.9 Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah m mengikuti Diklat)

No	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		TANGGAL DIKLAT
			TEKNIS	NON TEKNIS	
1	AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.,MH.	Ketua	Focus Grup Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Tahun Anggaran 2022 oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan Judul “Urgensi Pembentukan Sistem Kamar Pada Pengadilan Tinggi		10 November 2022
2	I.A.SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Focus Grup Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Tahun Anggaran 2022 oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan Judul “Urgensi		10 November 2022

			Pembentukan Sistem Kamar Pada Pengadilan Tinggi		
3	HANDRI MAMUDI, SH.,MH.	Panitera	Bimbingan Teknis ASN Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Surabaya		8 Juni s.d 10 Juni 2022
4	IBNU SOLA,SH.,MH.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Umum & Keuangan se Wilayah Hukum PT Surabaya		14 s.d 16 November 2022
			Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian se Wilayah Hukum PT Surabaya		15 s.d 17 November 2022
5	RINA INDRAJANTI,SH.,MH.	Hakim	FGD Penyusunan Naskah Akademik dengan Topik “Analisis Beban Kerja Hakim Untuk Memenuhi Tuntutan Formasi sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2020”		22 Juni 2022
			Pelatihan Singkat Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan		22 September s.d 30 September 2022
6	AGUNG CIPTOADI,SH.,MH.	Hakim	Pelatihan sertifikasi Hakim Perikanan bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia		17 Februari s.d 11 Maret 2022
			Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang I		14 Maret s.d 25 Maret 2022
7	EFRIDA YANTI,SH.,MH.	Hakim	Pelatihan sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh		31 Januari s.d 11 Februari 2022

			Indonesia	
8	ENI MARTININGRUN,SE., SH.,MH.	Hakim	Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Elementary Bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum PT Surabaya	11 Mei s.d 21 Mei 2022
9	ARI KARLINA,SH.,MH.	Hakim	Pelatihan sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	31 Januari s.d 11 Februari 2022
			Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Bidang Perpajakan	12 September s.d 24 September 2022
10	M.AUNUR ROFIQ,SH.,MH.	Hakim	FGD Penyusunan Naskah Akademik dengan Topik “Analisis Beban Kerja Hakim Untuk Memenuhi Tuntutan Formasi sesuai PERMENPAN RB No.1 Tahun 2020”	22 Juni 2022
11	A.A AYU CHRISTIN AGUSTINI,SH.,MH.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXVI bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	21 November s.d 10 Desember 2022
12	BAGUS TRENGGONO,SH.,MH.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh	11 April s.d 31 Mei 2022

			Indonesia		
13	SUGIANNUR,SH.	Hakim	Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Elementary Bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum PT Surabaya		11 Mei s.d 21 Mei 2022
			Focus Grup Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Tahun Anggaran 2022 oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan Judul “Urgensi Pembentukan Sistem Kamar Pada Pengadilan Tinggi		10 November 2022
14	AGUS YULIANTO,SH.,SH.	Panmud Hukum	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia		16 Maret s.d 17 Maret 2022
15	SUGENG AGUNG SISWOYO,SH.,MH.	Panmud Perdata	Bimbingan Teknis ASN Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Surabaya		8 s.d 10 Juni 2022
16	MEILANY KUSUMA NINGRUM,SH.	Panmud Khusus PHI	Bimbingan Teknis ASN Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Surabaya		8 Juni s.d 10 Juni 2022
17	LAZUARDHI ZEIN ENDRINATA,SE.,SH.	Kasubbag Umum & Keuangan	Bimbingan Teknis Umum & Keuangan se Wilayah Hukum PT Surabaya		14 s.d 16 November 2022

18	HASBULLAH,S.H.	Kasubbag Kepegawaian & ORTALA	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian se Wilayah Hukum PT Surabaya		15 s.d 17 November 2022
19	ROSA AGUS TAMDANI,SH.,MH.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis ASN Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Surabaya		8 Juni s.d 10 Juni 2022
20	AKBARUR RAIHAN,SH.,MH.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia		16 Maret s.d 17 Maret 2022
			Bimbingan Teknis ASN Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Surabaya		8 Juni s.d 10 Juni 2022
21	SUPRIYONO,SH.	Jurusita	Pelatihan Teknis Jurusita/Jurusita Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia 2022		27 Juni s.d 8 Juni 2022
22	KUSWANDI,SH.	Jurusita Pengganti	Bimbingan Teknis ASN Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Surabaya		8 Juni s.d 10 Juni 2022
23	SATRYO WICAKSONO,ST.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian se Wilayah Hukum PT Surabaya		15 s.d 17 November 2022
24	ADELIA FEBRIANTI,S.Sos.	Analisis Tata Laksana	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian se Wilayah Hukum PT Surabaya		15 s.d 17 November 2022
25	FENIK ANDRIYAS M.S,SH.	Bendahara	Bimbingan Teknis Umum & Keuangan se Wilayah Hukum PT Surabaya		14 s.d 16 November 2022
26	ANASTASIA MANIK,A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pelatihan Latsar CPNS Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d VIX Tahun 2022		21 Februari s.d 31 Mei 2022

			Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian se Wilayah Hukum PT Surabaya		15 s.d 17 November 2022
27	ANITA PUJI LESTARI,A.Md.	Pengadiminstrasi Register Perkara	Pelatihan Latsar CPNS Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d VIX Tahun 2022		21 Februari s.d 31 Mei 2022
28	ERINA RATNA BIDARI,SH.,MH.	Analisis Perkara Peradilan	Bimbingan Teknis ASN Kepaniteraan se Wilayah Hukum PT Surabaya		8 Juni s.d 10 Juni 2022
			Pelatihan Latsar CPNS Gelombang I Tahun 2022		8 Agustus s.d 12 November
29	MEIRISA YUNITA,SH.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Latsar CPNS Gelombang I Tahun 2022		8 Agustus s.d 4 November 2022
30	M.FARRAS DEKA M,SH.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Latsar CPNS Gelombang I Tahun 2022		8 Agustus s.d 4 November 2022
31	FRISKA ROSALINA,A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelatihan Latsar CPNS Gelombang I Tahun 2022		8 Agustus s.d 12 November 2022
32	MEYTI AGNESTA SEMBIRING,A.Md.	Pengelola Perkara	Pelatihan Latsar CPNS Gelombang I Tahun 2022		8 Agustus s.d 12 November 2022
33	SYINTHIA ROSA NAIBAHO,A.Md.	Pengelola Perkara	Pelatihan Latsar CPNS Gelombang I Tahun 2022		8 Agustus s.d 12 November 2022
34	RAFIKA LORENA,A.Md.	Pengelola Perkara	Pelatihan Latsar CPNS Gelombang II		5 September s.d 7 Desember 2022

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Mojokerto diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas. Adapun Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Negeri Gresik yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA/APBN) adalah dikelola oleh Pejabat dan Pegawai Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima serta Staf Keuangan.

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Anggaran di Pengadilan Negeri Malang terdiri dari dua DIPA, yaitu DIPA Unit Eselon I Badan Urusan Administrasi (005.01) dengan kode satker 098150, dan DIPA Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03) dengan kode satker 099138.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

DIPA 01

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Dipa 01

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Persen Realisasi (%)
			B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Ban. Sos (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Ban.Sos (Rp)	
1	098150	PN. Gresik	8.692.841.000	1.963.007.000	158.500.000	-	9.129.451.602	1.896.439.910	158.500.000	-	103.42%

DIPA 03

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Dipa 03

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Persen Realisasi (%)
			B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Ban. Sos (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Ban Sos (Rp)	
1	099138	PN. Gresik	-	169.074.000	-	-	-	163.703.325	-	-	96.82%

Realisasi penyerapan Anggaran DIPA 2022 pada Pengadilan Negeri Gresik dengan rincian sebagai berikut :

A. BELANJA BARANG DIPA 01 (098150)

1. Belanja Pegawai

- Pagu awal : 8.692.841.000
- Realisasi : 9.129.451.602
- **Sisa pagu : - 436.610.602**

2. Belanja Barang

- Pagu awal : 1.963.007.000
- Realisasi : 1.896.439.910
- **Sisa pagu : 66.567.090**

3. Belanja Modal

- Pagu awal : 158.500.000
- Realisasi : 158.500.000
- **Sisa pagu : 0**

B. BELANJA BARANG DIPA 03 (099138)

1. Belanja Barang

- Pagu awal : 169.074.000
- Realisasi : 163.703.325
- **Sisa pagu : 5.370.675**

Penerimaan Negara

A. Realisasi penerimaan Negara Pengadilan Negeri Gresik (098150) TA 2022 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapat Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 13.162.140,-
2. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TA yang lalu	Rp. -
3. Penerimaan kembali persekot Gaji	Rp. -
Jumlah Pendapatan	Rp. 13.162.140,-

B. Realisasi Penerimaan Negara Pengadilan Negeri Gresik (099138) TA 2022 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	Rp. 2.870.000,-
2. Pendapatan uang meja (Legas)	Rp. 5.910.000,-
3. Pendapatan ongkos perkara	Rp. 14.960.000,-
4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	Rp. 53.644.500,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 77.384.500,-

B. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

Selama periode tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri Gresik mengelola sarana dan prasarana yang menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) meliputi:

Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2022

✓ Tanah (Rumah Dinas)

Tabel 4.3 Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2022

NO	Lokasi Tanah	Luas Tanah
1	Jl. Raya Permata No. 6 Gresik	4.410 M2
2	Jl. Panglima Sudirman No. 110 Gresik	1.615 M2
3	Jl. Basuki Rahmat No. 7 Gresik	597 M2
4	Sangkarapura Bawean	2.109 M2
5	Jl. Kartini XII No. 49,51,53,55,57	1.000 M2
6	Jl. Kartini XIV / 6 Gresik	200 M2
7	Jl. Kartini No. 234 Gresik	216 M2
8	Jl. Dr. Soetomo VI No. 6,8	400 M2

Adapun Rincian Gedung bangunan kantor tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.4 Gedung bangunan kantor

NO	Peruntukan	Lokasi Bangunan	Luas Bangunan
1	Gedung Kantor Baru	Jl. Raya Permata No. 6 Gresik	2.400 M2
2	Gedung kantor lama	Jl. Basuki Rahmat No. 7 Gresik	1.051 M2
3	Gedung kantor lama	Jl. Panglima Sudirman No. 110 Gresik	492 M2

Adapun Rincian Bangunan Rumah Dinas tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.5 Rincian Bangunan Rumah Dinas

NO	Peruntukan	Lokasi Bangunan	Luas Bangunan
1	Rumah Dinas Ketua Pengadilan	Jl. Raya Kartini 234 Gresik	70 M2
2	Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan	Jl. Raya Kartini XIV / 6 Gresik	70 M2
3	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 57	70 M2
4	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 55	70 M2
5	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 49	70 M2
6	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 51	70 M2
7	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 53	70 M2
8	Rumah Dinas Hakim	Jl. Soetomo VI / 8 Gresik	70 M2
9	Rumah Dinas Hakim	Jl. Soetomo VI / 6 Gresik	70 M2

✓ Kendaraan Roda 4

Tabel 4.6 Kendaraan Roda 4

N0	JABATAN / BAGIAN	JENIS KENDARAAN	PEROLEHAN	NOMOR POLISI
1	Ketua	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Hitam metalik	Pinjam Pakai Pemda	W 1447 AP
2	Wakil Ketua	Toyota Fortuner Putih	Pinjam Pakai Pemda	W 1189 BU
3	Panitera	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1564 AP

4	Sekretaris	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1562 AP
5	Panitera Muda Hukum	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1510 AP
6	Panitera Muda Perdata	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1563 AP
7	Ka Sub BagOrtala dan Tata Laksana	Terios Silver	APBN	W 1106 AP
8	Ka Sub Umum dan Keuangan	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1509 AP
9	Panitera Muda Pidana	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1511 AP
10	Kuasa Pengguna Barang	Toyota Innova Warna Hitam	APBN	W 1267 AP
11	Kuasa Pengguna Barang	Toyota Kijang Warna Hijau	APBN	W 1686 AP
12	Kuasa Pengguna Barang	Daihatsu Terios Warna Hitam	APBN	W 682 AP

✓ Kendaraan Roda 2

Tabel 4.7 Kendaraan Roda 2

N0	JABATAN / BAGIAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI
1	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor (Mega Pro)	W 3135 AP
2	Ka Sub Bag PTIP	Sepeda Motor Supra X	W 3598 AP
3	Jurusita	Sepeda Motor (Mega Pro)	W 3834 AP
4	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor (Mega Pro)	W 3136 AP
5	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor (Mega Pro)	W 3867 AP

✓ Meubelair (Peralatan Kantor Lainnya)

Tabel 4.8 Kondisi Barang barang Inventaris

**KONDISI BARANG-BARANG INVENTARIS
KANTOR PENGADILAN NEGERI GRESIK TAHUN 2022**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN			KETERANGAN
			BAIK	R. RINGAN	R. BERAT	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. BARANG BERGERAK					
1	Station Wargon	4	4	-	-	
2	Sepeda Motor	5	5	-	-	
3	Mesin Ketik Manual Portable	9	9	-	-	
4	Mesin ketik manual standard	2	3	-	-	
5	Mesin Ketik Listrik Portable	1	1	-	-	
6	Mesin Ketik Listrik Langewagon	2	2	-	-	
7	Lemari besi/ metal	5	5	-	-	
8	Lemari kayu	37	37	-	-	
9	Rak besi	25	25	-	-	
10	Rak Kayu	14	14	-	-	
11	Filing kabinet	20	20	-	-	
12	Brangkas	3	3	-	-	
13	Kardex kayu	1	1	-	-	
14	Tabung pemadam kebakaran	3	3	-	-	
15	Fire Alarm	5	5			
16	CCTV- camera control	8	8	-	-	
17	Papan Visul/ Papan Nama	31	31	-	-	
18	White Board	14	14	-	-	
19	Peta	2	2	-	-	
20	Mesin Absen	3	3	-	-	
21	Hand metal Detector	1	1	-	-	
22	LCD Projektor/ Infocus	4	4	-	-	
23	Focusing Screen/ layar LCD	1	1	-	-	
24	Perkakas kantor lainnya	1	1	-	-	
25	Meja kerja besi/ metal	3	3	-	-	
26	Meja kerja kayu	136	135	1	-	
27	Kursi besi/ metal	198	195	3	-	
28	Kursi kayu	191	191	-	-	
29	Sice	6	6	-	-	
30	Bangku panjang	62	62	-	-	
31	Meja rapat	1	1	-	-	
32	Meja Komputer	12	12	-	-	
33	Meja telepon	2	2	-	-	
34	Meja Resepsionis	2	2	-	-	
35	Sketsa	10	10	-	-	
36	Jam mekanis	2	2	-	-	
37	Jam Elektronik	9	9	-	-	

38	Mesin Penghisap debu	1	-	-	1
39	Lemari ES	2	2	-	-
40	A.C Split	51	51	-	-
41	Kipas angin	18	18	-	-
42	Tandon air	2	2	-	-
43	Televisi	3	3	-	-
44	Amplifier	2	2	-	-
45	Loudspeaker	2	2	-	-
46	Sound System	24	24	-	-
47	Karaoke	1	1	-	-
48	Microphone table stand	10	10	-	-
49	Unit Power Supply	1	1	-	-
50	Lambang Garuda Pancasila	5	5	-	-
51	Gambar Presiden @ Wakil	3	3	-	-
52	Tiang bendera	10	10	-	-
53	Kaca Hias	5	5	-	-
54	Palu sidang	4	4	-	-
55	Lambang Instansi	2	2	-	-
56	Vertikal Blind	3	3	-	-
57	Gordyin/kray	57	57	-	-
58	Intercom Unit	1	1	-	-
59	Telephone (PABX)	4	4	-	-
60	Facsimile	2	2	-	-
61	Mainframe (komputer jaringan)	4	4	-	-
62	Internet	1	1	-	-
63	P.C Unit	78	77	-	1
64	Laptop	29	20	-	9
65	Printer	26	26	-	-
66	Server	2	2	-	-
67	Hub	1	1	-	-
68	Rak serve	1	1	-	-

Tabel 4.9 Buku Perpustakaan Pengadilan Negeri Gresik

JUMLAH BUKU PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI GRESIK

NO	KLARIFIKASI	SUB - SUB KELOMPOK KLARIFIKASI BIDANG	JUMLAH
1	2	3	4
1.	209I0000	Hukum Perdata	292
2.	209II0000	Hukum Dagang	284
3.	209III000	Hukum Adat	312
4.	209IV000	Hukum Agraria	106
5.	209V0000	Hukum Islam	56
6.	209VI000	Hukum Perburuan	31
7.	209VII00	Hukum Kewarganegaraan	26
8.	209VIII0	Hukum Pidana	569
9.	209IX000	Hukum Anak -anak	9
10.	209X000	Hukum Acara Perdata	81
11.	209XI000	Hukum Acara Pidana	168
12.	209XII00	Hukum perpajakan	27
13.	209XIII0	Hukum Administrasi	108
14.	209XIV0	Hukum Antar Golongan	20
15.	209XV00	Hukum Internasional Hukum Publik	91
16.	209XVI0	Internasional	25
17.	209XVII0	Hukum Tata Negara	998
18.	209XX00	Kriminologi	77
19.	209XXI0	Sosiologi	103
20.	209XXII0	Filsafat Hukum	49
21.	209XXIII	Hukum Lingkungan	64
22.	209XXIV0	Per Undang-Undangan	705
23.	209XXV0	Umum	1184
JUMLAH			4,896

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Upaya untuk mengaplikasikan teknologi informasi terhadap layanan di internal Pengadilan Negeri Gresik maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan memerlukan kebijakan pengelolaan sistem TI yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting untuk mendorong terwujudnya visi Pengadilan Negeri Gresik: Terwujudnya Pengadilan Negeri Gresik yang Agung.

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang mencukupi merupakan syarat penting keberlangsungan pengelolaan teknologi informasi yang memadai.

Teknologi informasi merupakan faktor penting pendukung kinerja instansi, khususnya pada Pengadilan Negeri Gresik. Saat ini fasilitas teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Gresik telah dioperasikan non-stop selama 24 jam setiap harinya, sehingga pengisian data dan akses informasi dapat diakses setiap waktu oleh seluruh warga Pengadilan Negeri Gresik di lingkungan kantor. Berikut akan diulas secara detail mengenai pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Gresik.

a. Ruang Server



Gambar 4.2 Rak Server



Gambar 4.3 Komputer Server



Gambar 4.4 Tampilan Perangkat Keras Server Pengolah Data dan Jaringan Komputer

Pengadilan Negeri Gresik telah mengalokasikan secara khusus ruangan sebagai Data Center dan Network Operational Control (NOC). Ruangan tersebut telah dilengkapi dengan pendingin ruangan berjenis AC split sebanyak 2 unit dengan besaran 1 PK yang mendinginkan ruangan selama 24 jam setiap harinya.

- Perangkat keras pengelola data dan jaringan computer server

Tabel 3.10 Perangkat keras pengelola data dan jaringan computer server

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
1	Dedicated Server	Model :Tower IBM Prosesor : Intel Xeon 2 Cores Ram : 2 Gb HDD : 250 Gb SATA Model : Desktop Fujitsu RX1330M1 Prosesor : Intel Xeon E3-1231v3 4C/8T 3.40 GHz 8 MB Ram : 4 Gb HD SAS 6G 300GB (2)	2 Unit
2	Router	Mikrotik RouterBoard RB 1100	1 Unit

3	Wireless Concentrator	802.11 A/B/G Wireless Access Point/Modem	1 Unit
		802.11 A/B/G Wireless Access Point (diatur sebagai wireless client)	4 Unit
		802.11 A/B/G Wireless Access Point/Unifi (Pinjam Pakai HSP)	10 Unit

Untuk perangkat keras server pada tabel di atas telah ditempatkan pada ruang khusus dan lemari server khusus dengan pintu kaca dan didukung dengan UPS 4400VA untuk melindungi dari listrik mati dan Generator/Genset 250 KVA. Perangkat keras pengolah data berbentuk Mesin Absensi telah dikoneksikan dengan jaringan komputer Pengadilan Negeri Gresik.



Gambar 3.5 Mesin Fingerprint & Faceprint

- Perangkat keras pengamanan kantor

Tabel 3.11 Perangkat keras pengamanan kantor

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
1	CCTV Camera	CCTV indoor dan outdoor	35 Unit
2	Digital Video Recorder (DVR)	Standalone DVR dengan HDD	5 Unit

Seluruh perangkat keras pada tabel di atas telah ditempatkan dalam satu tempat bersama perangkat keras pengelola data dan jaringan komputer.

- Perangkat keras informasi public

Tabel 4.12 Perangkat keras informasi public

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
1	Flat Monitor/TV	40"/42"/50" LED TV	3 Unit
2	PC Antrian PTSP	Built Up	1 Unit
3	PC SIPP	Built Up	1 Unit
4	PC KIOS K IKM/IPK	Built Up	2 Unit
5	PC KIOS K ANDROID	Built Up	1 Unit

Perangkat keras informasi publik tersebut memiliki fungsi utama untuk menampilkan jadwal sidang dan pelacakan perkara bagi pengunjung Pengadilan Negeri Gresik. Perangkat tersebut terhubung dengan CPU yang terletak di lobi Informasi dan Pengaduan.

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang dimaksudkan adalah perangkat lunak yang dipergunakan dalam pengolahan data dan informasi pada Pengadilan Negeri Gresik. Berikut detail perangkat lunak yang dipergunakan :

- a. Website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
www.pn-gresik.go.id berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita, persyaratan, informasi perkara, putusan dan pengumuman yang ada pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A



Gambar 4.6 Website Pengadilan Negeri Gresik

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Website : <http://sipp.pn-gresik.go.id/>

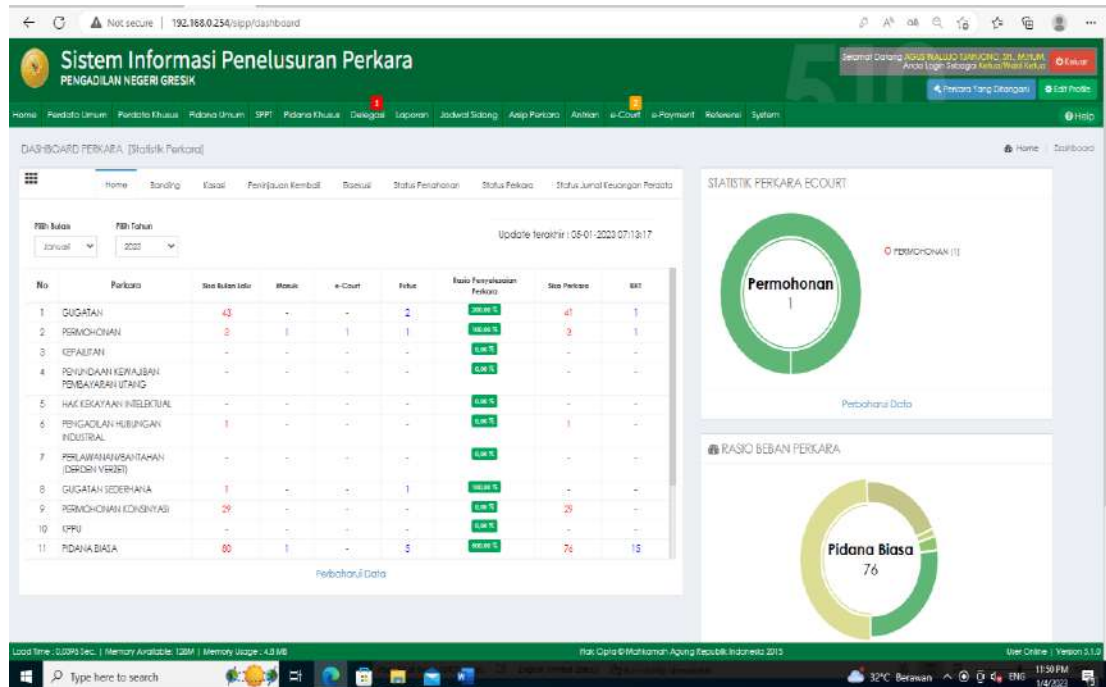
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	1/Pd.B/2023/PN-Gsk	02 Jan 2023	Pencutan	Penuntut Umum: MARIA SUELA GRACELA RAGA, S.H. Terdakwa: MUHAMMAD FARIZ	Sidang pertama	8 Hari	[detail]
2	29/Pdt.P-Konv/2022/PN-Gsk	29 Dec 2022	Perwakilan Ganti Kerugian	Pemohon: LINANDA KRISNI SUSANTI, S.AP, M.AP, PPK Jalan Tol Krian Legundi Bundar Mulyar Terdiahar: Aksep P. Amir	Sidang pertama	12 Hari	[detail]
3	27/Pdt.P-Konv/2022/PN-Gsk	29 Dec 2022	Perwakilan Ganti Kerugian	Pemohon: LINANDA KRISNI SUSANTI, S.AP, M.AP, PPK Jalan Tol Krian Legundi Bundar Mulyar Terdiahar: Wili Widyawati	Sidang pertama	12 Hari	[detail]
4	26/Pdt.P-Konv/2022/PN-Gsk	29 Dec 2022	Perwakilan Ganti Kerugian	Pemohon: LINANDA KRISNI SUSANTI, S.AP, M.AP, PPK Jalan Tol Krian Legundi Bundar Mulyar Terdiahar: Niki Shwasyuni	Sidang pertama	12 Hari	[detail]
5	25/Pdt.P-Konv/2022/PN-Gsk	29 Dec 2022	Perwakilan Ganti Kerugian	Pemohon: LINANDA KRISNI SUSANTI, S.AP, M.AP, PPK Jalan Tol Krian Legundi Bundar Mulyar Terdiahar: Niki Shwasyuni	Sidang pertama	12 Hari	[detail]

Gambar 4.7 SIPP PN Gresik

c. SIPP Local Host

Manajemen Administrasi di internal Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dijalankan oleh seluruh bagian Kepaniteraan. Hingga saat ini Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.1.0 yang telah terintegrasi dengan SIPP pada

Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun dengan Mahkamah Agung dengan kondisi data yang telah dimuktahirkan setiap harinya.

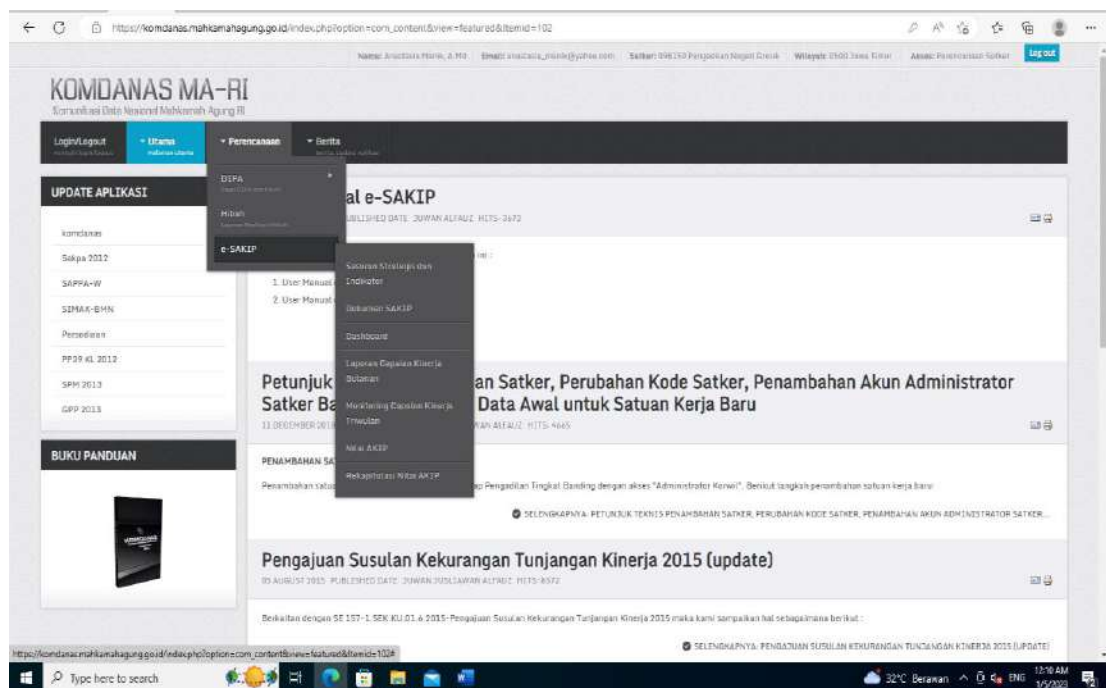


Gambar 4.8 SIPP Local Versi 5.1.0

d. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

<http://komdanas.mahkamahagung.go.id>

Aplikasi ini digunakan untuk laporan pada bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan dan Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

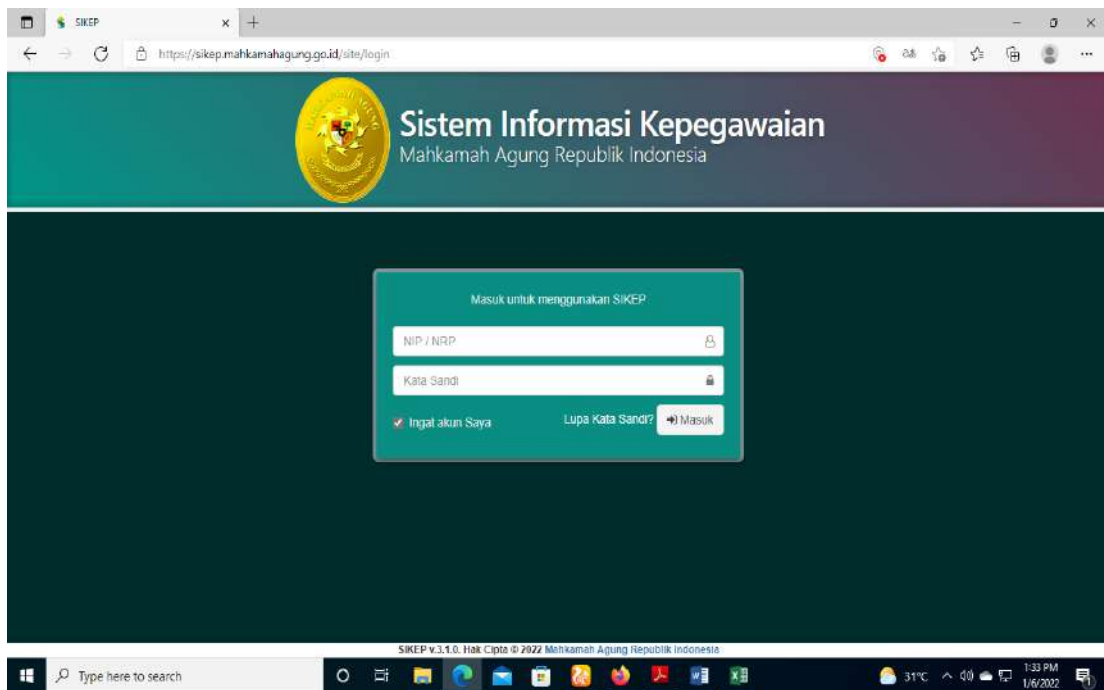


Gambar 4.9 KOMDANAS

e. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

<https://sikep.mahkamahagung.go.id/>

Aplikasi yang digunakan untuk update data pegawai pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Untuk saat ini aplikasi tersebut mulai diterapkan untuk Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang nantinya proses kenaikan pangkan akan menggunakan sistem paperless yaitu tanpa hardcopy.

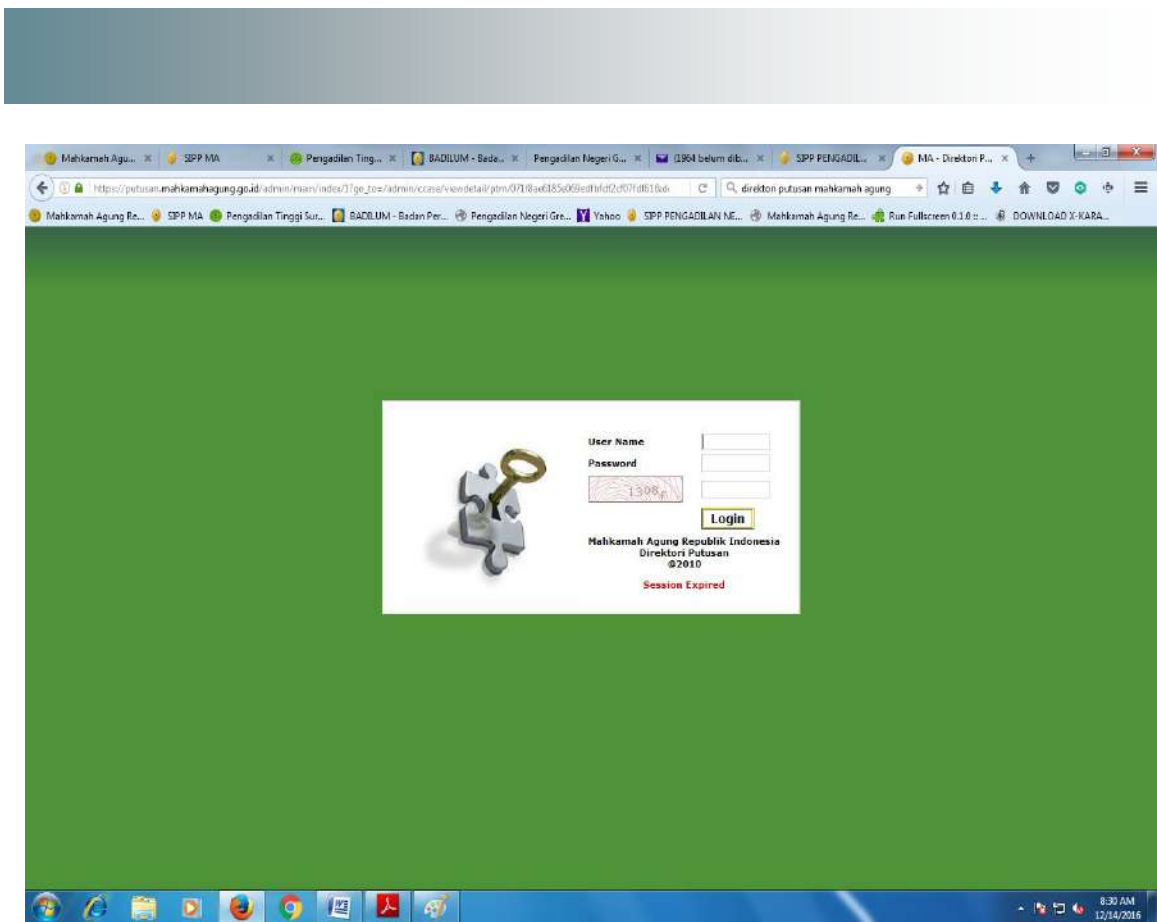


Gambar 4.10 SIKEP

f. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-gresik>

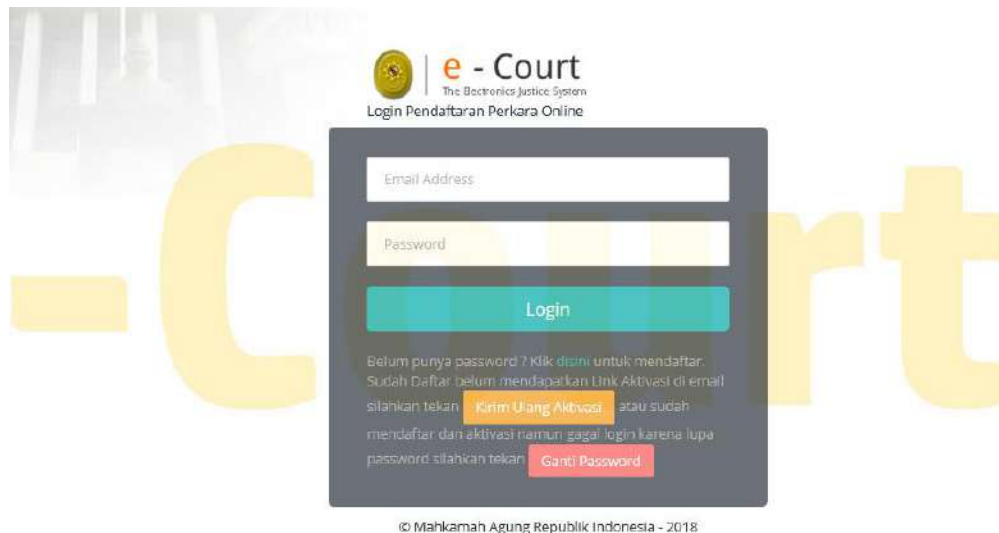
Aplikasi berbasis website untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi, maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.



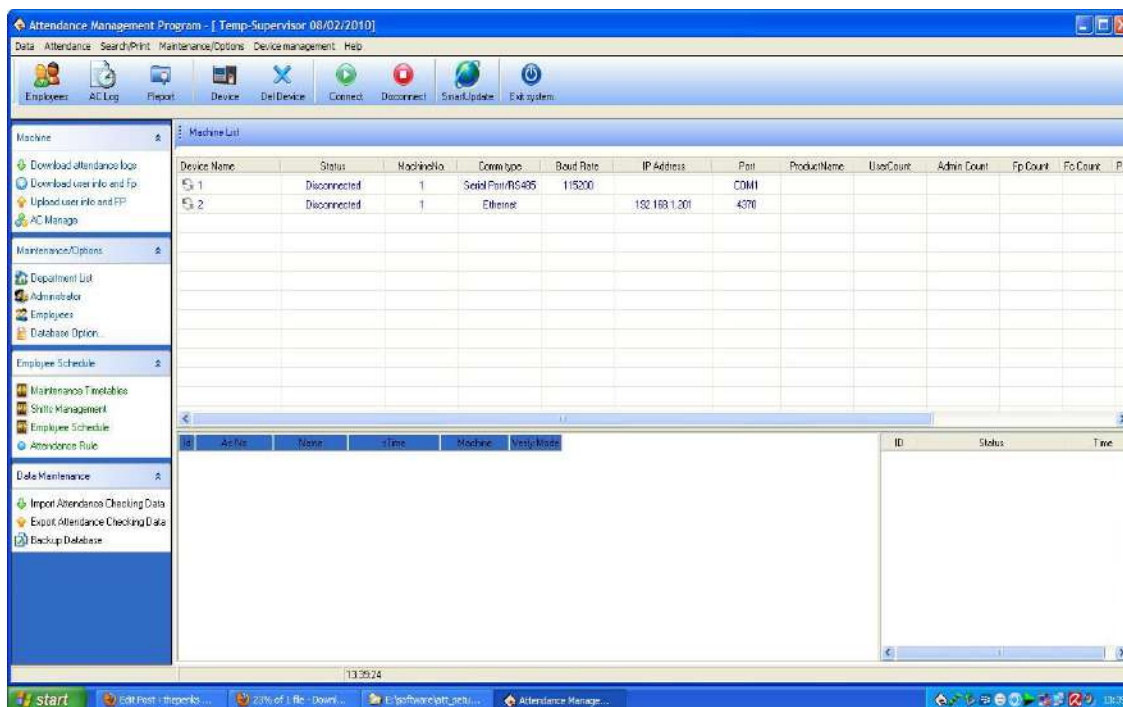
Gambar 4.11 Direktori Putusan Mahkamah Agung

g. E-Court Mahkamah Agung RI

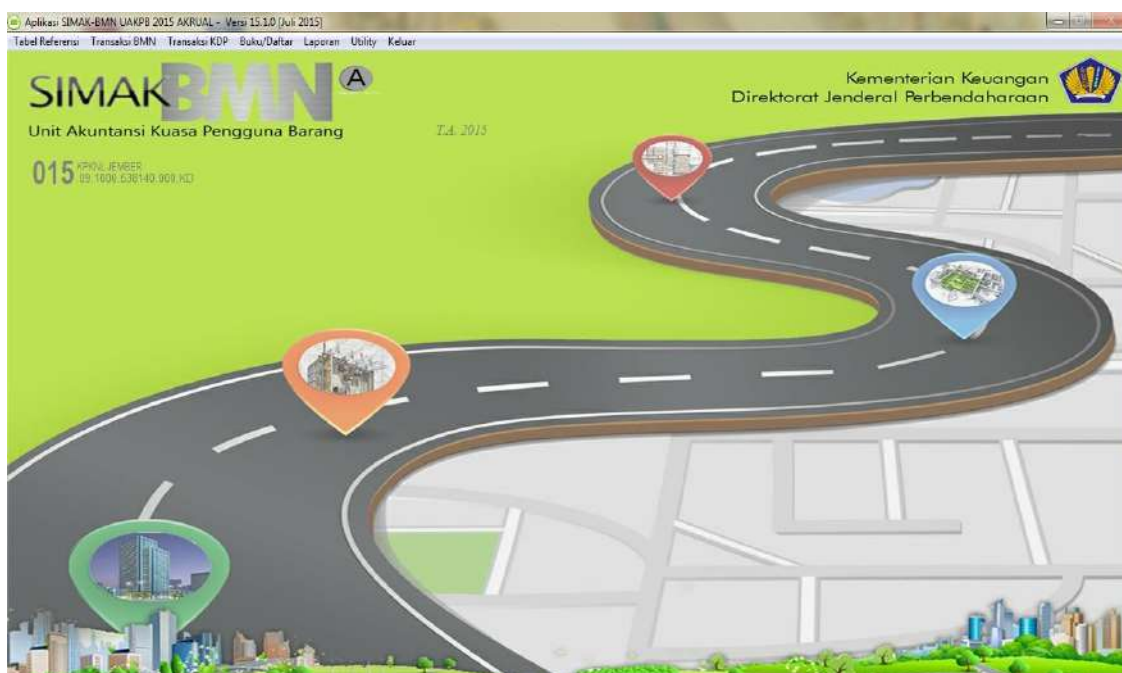
Aplikasi tersebut adalah suatu revolusi bagi dunia peradilan karena dalam aplikasi tersebut telah mendukung e-Filing (Pendaftaran Online), e- Payment (Pembayaran Online), e-Summons (Panggilan Elektronik) dan e-Litigasi (Persidangan Online).



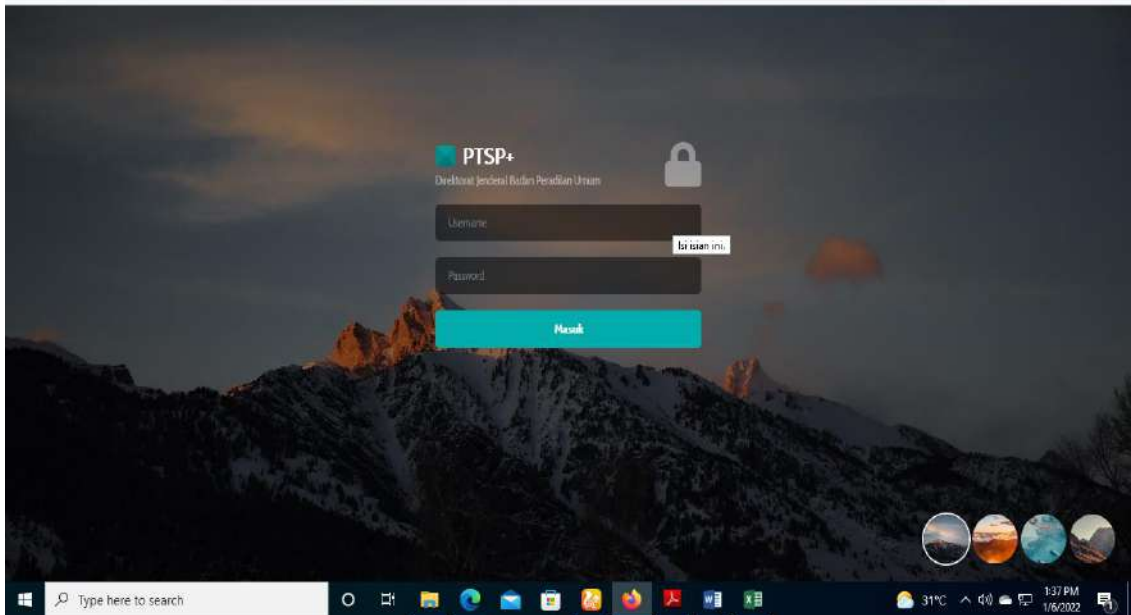
Gambar 4.12 Aplikasi e-Court (Pendaftaran Perkara Online)



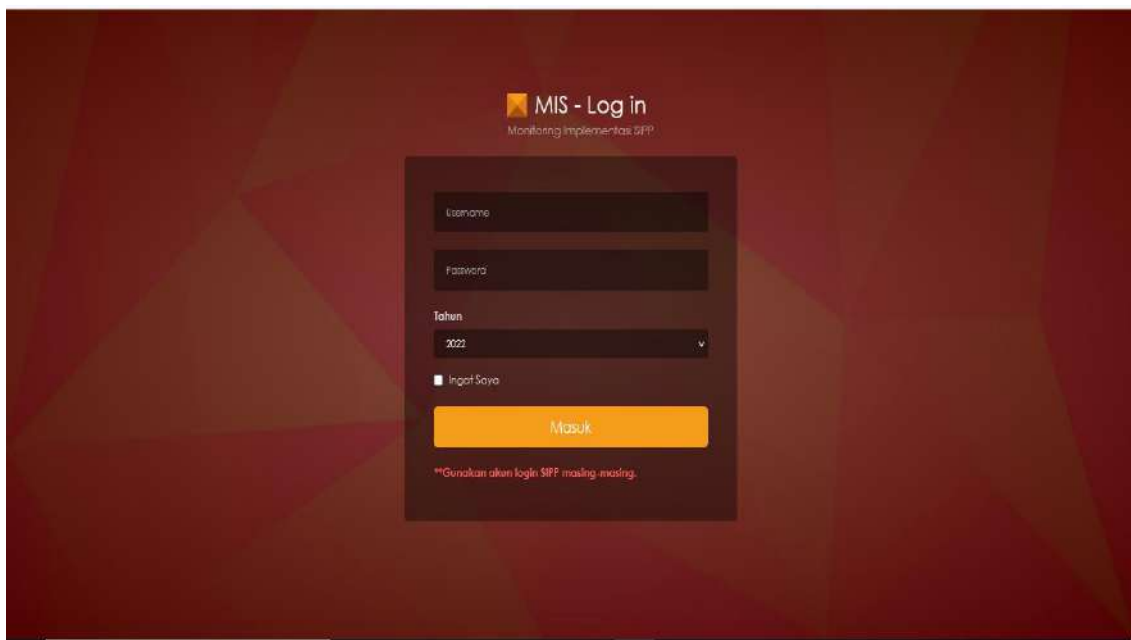
Gambar 4.13 Tampilan Attendance Management Pengadilan Negeri Gresik



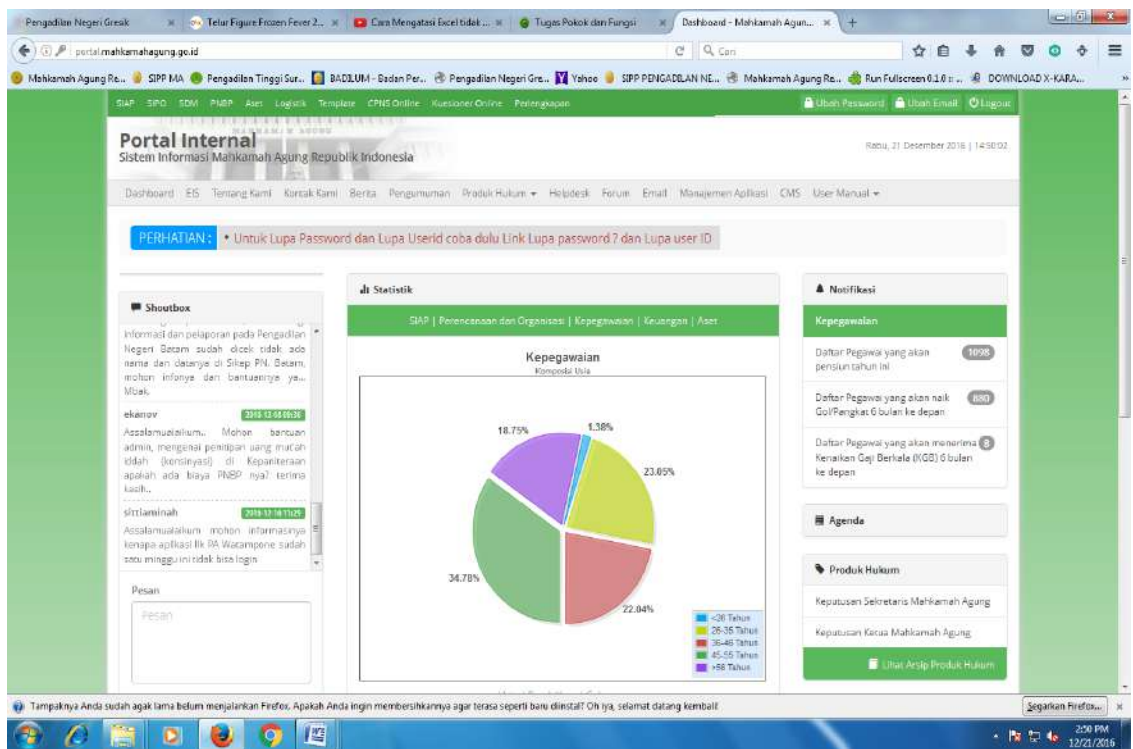
Gambar 4.14 Aplikasi SIMAK BMN



Gambar 4.15 Aplikasi PTSP



Gambar 4.16 Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)



Gambar 4.17 Aplikasi E-LK SIMARI



Gambar 4.18 Aplikasi ERATERANG



Gambar 3.19 Aplikasi SIWAS

Table 4.13 Daftar Aplikasi lainnya yang digunakan Pengadilan Negeri Gresik

No	Nama Perangkat Lunak	Fungsi	Jenis Perangkat Lunak	Instansi Pembuat/ Penyedia	Unit Pengguna
1	SIMAK-BMN (Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara)	Pendataan, pelaporan dan rekonsiliasi bulanan/ semester/ tahunan BMN	Desktop/ Stand Alone	Direktorat Sistem Perbendaharaan – Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI	Umum & Keuangan
2	PERSEDIAAN	Pendataan, pelaporan dan rekonsiliasi bulanan/ semester/ tahunan BMN Persediaan	Desktop/ Stand Alone	Direktorat Sistem Perbendaharaan – Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI	Umum & Keuangan
3	SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah)	Pendataan, pelaporan dan rekonsiliasi BMN berupa Tanah	Desktop/ Stand Alone	Direktorat Sistem Perbendaharaan – Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI	Umum & Keuangan

4	Website PN Gresik	Aplikasi layanan informasi publik tentang Pengadilan Negeri Gresik	Web/ WWW Online	Pengadilan Negeri Gresik	Umum & Keuangan
5	SAKTI (Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi)	Penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran	Web/ WWW Online	Direktorat Sistem Perbendaharaan – Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI	Umum & Keuangan
6	GPP (Gaji Pokok Pegawai)	Membantu PAPBP (Petugas Administrasi Pengelolaan Belanja Pegawai) dalam penyusunan dan pengajuan gaji	Desktop/ Stand Alone	Direktorat Sistem Perbendaharaan – Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI	Umum & Keuangan
7	SAS (Sistem Aplikasi Satker)	Menerbitkan Surat Perintah Membayar	Desktop/ Stand Alone	Direktorat Sistem Perbendaharaan – Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI	Umum & Keuangan
8	PP39		Desktop/ Stand Alone	Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan – Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	Umum & Keuangan

9	Monev SMART		Web/ WWW Online	Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan – Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	Umum & Keuangan
10	SAIBA	Pendataan, pelaporan keuangan dan rekonsiliasi bulanan/ semester/ tahunan	Desktop/ Stand Alone	Direktorat Sistem Perbendaharaan – Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan RI	Umum & Keuangan
11	KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)	Membantu pelaporan bidang Kesekretariatan	Web/ WWW Online	Mahkamah Agung RI	Umum Keuangan Ortala
12	SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking System)	Pengelolaan data perkara dan keuangan perkara Pengadilan Negeri	Web/ Local Online dan WWW Online	Direktorat Jenderal Badilum - Mahkamah Agung RI	Hakim Kepaniteraa n
13	Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	Membantu pengelolaan dokumen putusan seluruh tingkat pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI	Web/ WWW Online	Mahkamah Agung RI	Hakim Kepaniteraa n
14	SAPK	Membantu pengelolaan data pegawai negeri sipil seluruh Indonesia	Web/ WWW Online	Badan Kepegawaian Negara	Ortala

15	SIKEP	Membantu pengelolaan data pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Peradilan Umum	Web/ WWW Online	Direktorat Jenderal Badilum - Mahkamah Agung RI	Ortala
16	Attendance Management System	Membantu pengelolaan data absensi pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik.	Desktop/ Stand Alone	Mbio The Real Fingerprint	Ortala
17	E-LLK / Lembar Kerja Pegawai Elektronik	Mencatat urain kerja pegawai setiap hari secara online	Web/ WWW Online	Mahkamah Agung RI	Ortala / Semua Pegawai
18	Aplikasi PTSP	Aplikasi Surat Masuk, surat keterangan, tamu, sita geledah	Web/ Local	Mahkamah Agung RI	Petugas PTSP
19	Aplikasi MIS	Membantu Monitoring Pengisian SIPP	Web/ Local	Mahkamah Agung RI	Pengguna SIPP
20	Aplikasi E-Court	Pendaftaran Perkara Secara Online	Website	Mahkamah Agung RI	Pendaftar Perkara/ Pengguna Terdaftar
21	Aplikasi SIWAS	Pengaduan Online	Website	Mahkamah Agung RI	Petugas
22	Aplikasi Eraterang	Pendaftaran surat keterangan secara Online	Website	Mahkamah Agung RI	Petugas

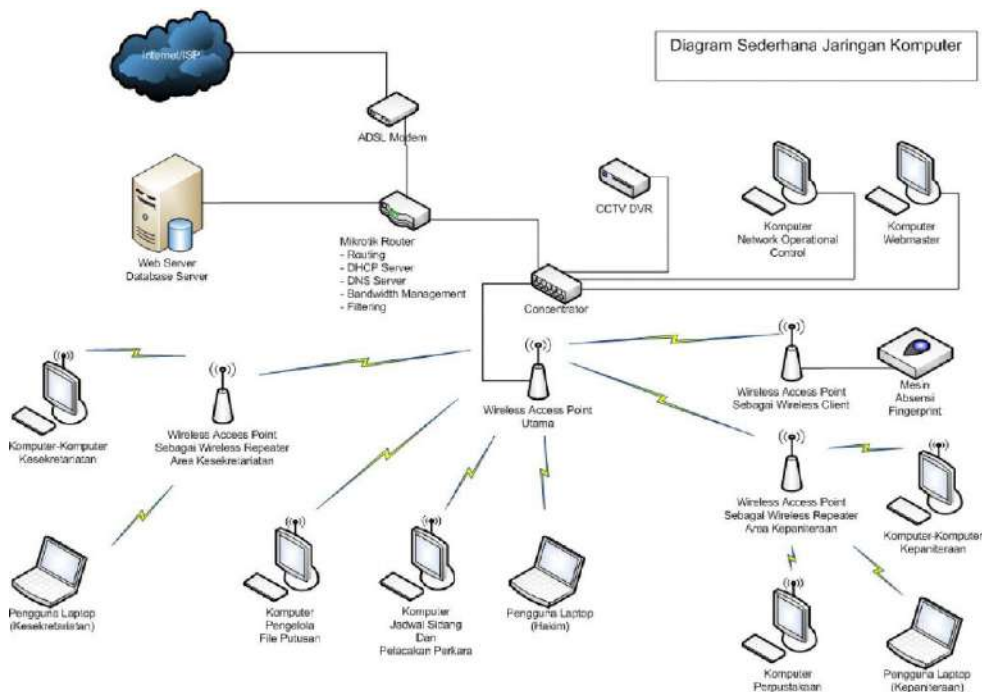
Untuk website, Pengadilan Negeri Gresik menyewa space hosting pada DOMAINESIA. Untuk domain **www.pn-gresik.go.id** mempergunakan layanan dari PANDI (Pengelola Alamat Domain Indonesia). Pilihan untuk menempatkan website pada penyedia layanan hosting swasta adalah menganut konsep Cost-Effective and Maintenance Free dengan artian bahwa Pengadilan Negeri Gresik tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk koneksi internet berkecepatan tinggi dan tidak perlu menyediakan perangkat server yang mahal untuk melayani akses website Pengadilan Negeri Gresik.

Akses SIPP yang di onlinekan dapat dilakukan dengan cara melakukan akses pada alamat sub-domain **sipp.pn-gresik.go.id**

Pengadilan Negeri Gresik berlangganan internet Intinet dengan besaran bandwidth sebesar 200 Mbps. Bandwidth tersebut merupakan paket berlangganan bandwidth dedicated 1:1.

Untuk menjamin pembagian bandwidth untuk download yang merata, maka telah dilakukan pengaturan dengan menggunakan Router Mikrotik RB 1100 dengan ketentuan batas maksimum untuk browsing internet adalah 5 Mbps dan batas maksimum untuk download file adalah 5 Mbps untuk setiap IP Address.

Hampir seluruh komputer pada Pengadilan Negeri Gresik tersambung pada jaringan lokal dengan menggunakan jaringan nirkabel. Penggunaan jaringan nirkabel dimaksudkan untuk kemudahan manajemen jaringan lokal.



Gambar 4.20 Diagram Sederhana Jaringan Komputer Pengadilan Negeri Gresik

3. Implementasi e- court di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik telah menyediakan fasilitas tambahan untuk membantu para pihak berperkara yang ingin memanfaatkan layanan administrasi perkara secara elektronik yakni Pelayanan Informasi E-Court. Layanan ini berada tepat di samping meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik, Pelayanan Informasi E-Court memberikan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan hal-hal lainnya mengenai layanan E-Court. Namun lebih dari itu, ia juga akan membantu mendaftarkan akun pada E-Court dan memandu cara pendaftaran perkara melalui E-Court kepada para

pencari keadilan, baik para Advokat maupun Non Advokat atau pengguna lainnya. Dengan adanya Pelayanan Informasi E-Court ini diharapkan dapat membantu para pencari keadilan mendapatkan layanan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Layanan yang disediakan meliputi :

- *E-filling* (pendaftaran perkara secara online)
- *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara secara online)
- *E-Summons* (Pemanggilan Pihak berperkara secara online)
- *E-Litigation* (Persidangan secara Online)

Pada Tahun 2021 di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah mengimplementasikan *e-court* dengan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-court* sebanyak 1109 perkara yang terdiri dari 653 perkara permohonan, 371 perkara gugatan, 82 perkara gugatan sederhana dan bantahan 8. Pengimplementasian layanan *e-court* di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA didukung dengan adanya fasilitas seperti pojok *e-court*, brosur *e-court* dll yang dapat mempermudah pencari keadilan untuk berperkara secara elektronik melalui *e-court*.



Gambar 4.21 Pelayanan Informasi E-court

4. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk melacak sejauh mana proses perkara itu berjalan sehingga masyarakat bisa mengetahui proses perkara secara transparan dengan mudah dan cepat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja aparatur pengadilan oleh pimpinan di masing-masing satuan kerja maupun Pimpinan Tingkat Banding dan Pimpinan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Jombang telah mengimplementasikan SIPP dan secara rutin melakukan sinkronisasi data SIPP lokal dengan data SIPP website serta SIPP Mahkamah Agung sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari. Adapun rasio pengananan perkara per tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan data dari aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) sebesar 96 %.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. AKREDITAS PENJAMIN MUTU

Yogyakarta, 14 September 2016 bertempat di Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, Pengadilan Negeri Gresik untuk pertama kalinya mendapat penghargaan Akreditasi PMPN (Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri) dan ISO 9001:2015 dari Dirjen Badilum (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan predikat A (Excellent) Penghargaan Akreditasi ini di berikan langsung oleh Bpk. H. Suwardi, SH., MH. selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI (Bidang Non Yudisial), dan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik yaitu Bapak Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. periode 10 Febuari 2016 s.d 25 November 2021

Berikutnya pada tanggal 9 Desember 2022 dengan Ketua Bapak Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum kembali Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mendapatkan penghargaan dengan predikat yang dikirim langsung dari Dirjen Badilum Mahkammah Agung RI.

Seritifikat ini diberikan dengan tujuan saat itu agar mendorong pengadilan negeri sebagai ujung tombak penyelesaian hukum untuk menciptakan suatu kondisi peradilan yang modern, kredibel, akuntabel, dan transparan.



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DAN IA
TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS
DAN IA TAHUN 2022.
- KESATU** : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Negeri kelas IA Khusus dan IA berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir
dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022



Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Gresik

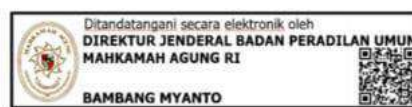



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022**

NO.	NAMA PENGADILAN	TIPE	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 72	dst.				
73	Pengadilan Negeri Gresik	IA	722	725	A
74 s/d 98	dst.				




 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Gambar 5.1 Petikan Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu

Selain itu, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A Khusus pada tahun 2022, telah menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan , Kantor Pelayanan PERbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II, Mahkamah Agung , dan PENGadilan Tinggi Surabaya, diantaranya adalah sebagai berikut::

1. Piagam Penghargaan Peraih IKPA Triwulan II Tahun 2022 dengan Nilai 98,26 diperoleh dari Kantor KKPN Surabaya II tanggal 12 Juli 2022



Gambar 5.2 Penghargaan Peraih IKPA Triwulan II Tahun

2. Piagam Apresiasi atas Partisipasi dalam mendukung digitalisasi Informasi Perkara Kementerian Keuangan Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI



Gambar 5.3 Piagam Apresiasi atas Partisipasi dalam mendukung digitalisasi Informasi Perkara Kementerian Keuangan Tahun 2022

3. Peringkat 8 Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik (68,30) Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1001-2000



Gambar 5.4 Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik

4. Peringkat 6 Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana (34,67) Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1001-2000



Gambar 5.5 Piagam Peringkat 6 Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana

5. Penghargaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk Peringkat 1 Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA, diperoleh dari YM Ketua MARI tertanggal 9 Desember 2022 dan diserahkan langsung oleh YM Ketua MARI kepada Ketua PN Gresik pada tanggal 12 Desember 2022 di hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta.



Gambar 5.6 Penghargaan Pos Bantuan Hukum

6. Piagam penghargaan atas Peringkat 3 Kategori Delegasi Pada pengadilan negeri kelas IA Khusus dan IA tanggal 16 Desember 2022.



Gambar 5.7 Piagam penghargaan atas Peringkat 3 Kategori Delegasi

7. Piagam Penghargaan Capaian Kinerja Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tanggal 16 Desember 2022.



Gambar 5.8 Piagam Penghargaan Capaian Kinerja Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)

8. Piagam Penghargaan Peringkat 3 Kategori Eksekusi Pada pengadilan negeri kelas IA Khusus dan IA tanggal 16 Desember 2022.



Gambar 5.9 Piagam Penghargaan Peringkat 3 Kategori Eksekusi

2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri/Hub Industrial Gresik Kelas IA sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2019 sudah mulai menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri/Hub Industrial Gresik Kelas IA ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar

menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.



Gambar 5.10 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

a. Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP

Dalam rangka pencegahan Covid-19 di lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri Gresik berinovasi dengan membangun Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP. Inovasi ini mengadopsi inovasi yang telah dibangun sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP Pengadilan Tinggi Surabaya dimana inovasi ini memanfaatkan teknologi teleconference untuk mempertemukan pengguna layanan pengadilan dengan petugas PTSP. Dengan meminimalisir kontak secara langsung, inovasi ini diharapkan dapat menekan angka penularan Covid-19 di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik.

Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP ini mempunyai sarana penunjang sebagai berikut:

1. PC sebanyak 6 unit, masing-masing untuk layanan umum, perdata, pidana, hukum, PHI, e-Court, dan SIWAS
2. Printer sebanyak 1 unit
3. Rak dokumen sebanyak 1 unit
4. Sarana pendukung lainnya seperti kursi, AC, dan jaringan internet



Gambar 5.11 Pelayanan Anjungan Mandiri PTSP

b. Gus Prima

Gus Prima merupakan aplikasi asisten virtual milik Pengadilan Negeri Gresik yang dapat digunakan baik oleh pihak eksternal (pengguna layanan pengadilan) maupun pihak internal Pengadilan Negeri Gresik. Bagi pihak eksternal, Gus Prima dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai status perkara, jadwal sidang, persyaratan layanan, dll. Bagi pihak internal, Gus Prima berfungsi sebagai reminder (pengingat) jadwal sidang, notifikasi MIS, notifikasi surat masuk, dll. Gus Prima dapat digunakan dengan menghubungi nomor **081131134545**.

c. Barcode Persyaratan Layanan Pengadilan

Barcode persyaratan layanan pengadilan merupakan upaya Pengadilan Negeri Gresik untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan pengadilan untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan layanan pengadilan. Barcode pelayanan ini tersedia di Lobi Utama maupun Anjungan Mandiri PTSP Pengadilan Negeri Gresik serta pada website Pengadilan Negeri Gresik. Kini pengguna layanan pengadilan dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai persyaratan layanan pengadilan cukup dengan men-scan barcode tersebut. Barcode persyaratan layanan pengadilan dapat yang terdapat pada website Pengadilan Negeri Gresik dapat diakses melalui tautan https://pn-gresik.go.id/ova_sev/jenis-layanan-ptsp.

d. Layanan Konsultasi dengan Posbakum Secara Virtual

Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Gresik membuat inovasi berupa layanan konsultasi dengan Posbakum secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Dengan layanan ini, para pencari keadilan tidak perlu bersusah payah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Gresik. Cukup dengan melakukan Join Meeting pada aplikasi Zoom Meeting menggunakan Meeting ID dan Password yang telah disediakan, pengguna layanan pengadilan dapat terhubung dengan Posbakum untuk melakukan konsultasi. Inovasi ini dibuat berdasarkan kerjasama/MOU antara Pengadilan Negeri Gresik dengan Posbakum Fajar Tri Laksana yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 09.00 – 11.30 WIB. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tautan https://pn-gresik.go.id/ova_dep/prosedur-pos-bantuan-hukum.

e. Facebook Pengadilan Negeri Gresik

Halaman Facebook Pengadilan Negeri Gresik digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Gresik, sekaligus sebagai sarana interaksi dengan masyarakat mengenai permasalahan hukum. Halaman Facebook Pengadilan Negeri Gresik dapat diakses melalui tautan <https://www.facebook.com/profile.php?id=100078474441571>.

f. Instagram Pengadilan Negeri Gresik

Instagram Pengadilan Negeri Gresik digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Gresik, sekaligus sebagai sarana interaksi dengan masyarakat mengenai permasalahan hukum. Instagram Pengadilan Negeri Gresik dapat diakses melalui tautan <https://www.instagram.com/pengadilannegerigresik/>.

g. Surabaya High Court Mobile Attendance (SHiCMA)

Untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 melalui kontak dengan alat absensi fingerprint, Pengadilan Tinggi Surabaya membuat aplikasi absensi berbasis Android sebagai pengganti absensi fingerprint yang bernama Surabaya High Court Mobile Attendance (SHiCMA) dan faceprint sehingga pengguna dapat absen tanpa bersentuhan dengan alat fingerprint dan faceprint. Aplikasi SHiCMA hanya bisa diakses pada area kantor dan tidak bisa diakses di luar area Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga validasi lebih dapat dipertanggungjawabkan dan untuk

meningkatkan pola pikir dan budaya kerja (kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan, kerapian, kebersihan, dan kesehatan).

SHiCMA telah diterapkan pada 35 (tiga puluh lima) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya termasuk di Pengadilan Negeri Gresik.

h. Audio Peringatan Anti Gratifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik akan memperdengarkan audio peringatan anti gratifikasi kepada masyarakat setiap 1 (satu) jam sekali. Untuk mengakomodir hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik mengeluarkan SK Nomor W14.U31/303/OT.00/4/2022 tentang Pelaksanaan Audio Peringatan Anti Gratifikasi pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

i. e-Court

e-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online dan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online (e-Filling), pembayaran secara online (e-Payment), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summon), dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Litigation), sehingga masyarakat tidak perlu lagi sidang ke pengadilan untuk jawab-jawab; para pihak cukup datang ke pengadilan pada saat pembuktian saja. e-Court dapat diakses pada tautan <https://ecourt.mahkamahagung.co.id>.

j. Eraterang

Eraterang merupakan media elektronik dalam memberikan layanan permohonan Surat Keterangan pada pengadilan negeri. Aplikasi ini merupakan alat bantu dalam layanan pembuatan Surat Keterangan yang harus dikeluarkan oleh pengadilan seperti Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, dll. Eraterang dapat diakses melalui tautan <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>. Adapun dasar hukum dari peluncuran aplikasi Surat Keterangan Elektronik adalah sebagai berikut.

1. Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2. Surat Edaran MA RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2016
3. Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara
4. SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum

k. Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER)

siSUPER adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan penilaian melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) kepada pengadilan. Survei Pelayanan Elektronik ini dapat diakses melalui tautan esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

l. Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)


Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan menyediakan sistem secara informatif kepada masyarakat akan ketersediaan fasilitas pengaduan masyarakat terhadap aparat Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik apabila melakukan penyalahgunaan kewenangan. SIWAS dapat diakses melalui tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

m. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) adalah aplikasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta peningkatan layanan kepegawaian, dan proses administrasi yang berbasis teknologi informasi dan aplikasi komputer. SIKEP berperan dalam pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi, serta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, akurat, dan berkualitas, juga pengelolaan data dan informasi secara sistematis.

n. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Hal ini berdasarkan Peraturan



Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

Pengadilan Negeri Gresik menyediakan akses bagi pengguna SP4N-LAPOR! yang terintegrasi dengan website Pengadilan Negeri Gresik. Cukup kunjungi website Pengadilan Negeri Gresik kemudian klik tombol SP4N-LAPOR! yang terdapat pada Beranda, maka Anda akan dialihkan ke alamat <https://lapor.go.id> untuk dapat mulai menggunakan layanan SP4N-LAPOR!

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Selanjutnya mengenai pengawasan ini, Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan Perma No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080/SK/VIII/2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

- PENGAWASAN MELEKAT

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim

Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pengadilan Negeri Gresik, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : W.14.U.31/844/OT.00/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Jubir, dan Humas Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Hakim-Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	HAKIM PENGAWAS
1.	Sarudi, S.H	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2.	Agung Nugroho Suryo. S, S.H., M. Hum	Hakim	Pengawas Bidang Perdata
3.	Efrida Yanti, S.H.M.H M. Aunur Rofiq, S.H., M.H	Hakim	Hakim Telaah Eksekusi
4.	Sri Sulastuti, SH	Hakim	Pengawas Bidang Hukum
5.	Sri Hariyani, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Pidana
6.	Etri Widayati, SH., MH	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial
7.	Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
8.	Rina Indrajanti, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
9.	Ari Karlina, S.H.M.H Bagus Trenggono, SH., MH	Hakim	Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala
10	Fitra Dewi Nasution, SHMH	Hakim	Pengawas Panggilan Delegasi
11	Fifiyanti, SH.MH	Hakim	Pengawas PTSP
12	Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengawas dan Pengamat (Kim Wasmat)

13	A.A Ayu Christin Agustini, SH.MH	Hakim	Pengawas SIPP
----	----------------------------------	-------	---------------

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Surabaya dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, pada Pengadilan Negeri Gresik telah dilakukan pembinaan dan Pembinaan oleh team Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

- **PENGAWASAN FUNGSIONAL**

Pengawasan fungsional telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

B. EVALUASI

Sesuai hasil pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengawasan oleh para pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, Bahwa pada dasarnya semua administrasi dalam keadaan baik, namun masih perlu pembenahan yang lebih baik di bidang kepaniteraan dan di bidang kesekretariatan.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Gresik pada Tahun 2022 tetap melanjutkan program-program yang telah berlangsung pada Tahun 2014 dimana Mahkamah Agung RI mulai giat menggalakkan teknologi informasi disegala bidang administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan.

Program Mahkamah Agung RI antara lain E-Document, E-litigation, SIPP, Simak, Desk Info /PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), E-Court dan Sistem Administrasi Keuangan, memacu pengadilan Negeri Gresik untuk mengikuti semua perubahan-perubahan tersebut.

Walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami meningkatkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur maupun anggaran pada Pengadilan Negeri Gresik yang ada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, yang dituangkan dalam laporan tahunan 2021.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas pada Pengadilan Negeri Gresik terutama untuk mendukung IT diperlukan infrastruktur yang berbasis teknologi dan SDM yang berkualitas sehingga keluaran dari input yang diterima akan maksimal dan berkualitas lebih.

B. REKOMENDASI

Di mohon kiranya :

1. Menambah Diklat sumber daya manusia terutama bidang teknologi (IT).
2. Peningkatan kualitas SDM dan pelaksanaan tugas kepegawaian dengan diadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala.
3. Menambah jumlah pegawai, dikarenakan jumlah pegawai yang ada saat ini terbatas, sehingga proses administrasi dan manajemen peradilan pada Pengadilan Negeri Gresik kurang maksimal.
4. Menambah Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.
Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembangunan Sarana Prasarana. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gresik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

Demikian laporan pelaksanaan tugas Tahun 2022 sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gresik yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural/ fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan serta seluruh staf pelaksana yang telah berupaya untuk mencapai target yang sesuai program kerja yang telah tersusun.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi dan kajian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pelaksanaan tugas untuk masa yang akan datang lebih baik.

Demikian dan terima kasih.

Gresik, Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial Gresik Kelas IA



Agus Walujo Tjahjono, S.H., M. Hum

LAMPIRAN



APM



RAPAT PERSIAPAN ZONA INTEGRITAS



SIDANG ONLINE MELALUI APLIKASI ZOOM



PEMBINAAN OLEH MAHKAMAH AGUNG MELALUI APLIKASI ZOOM



RAPAT DINAS BULANAN RUTIN



RAPAT RUTIN HAKIM PENGAWAS BIDANG



RAPAT BERJENJANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN



RAPAT RUTIN BULANAN KEPANITERAAN & KEJURUSITAAN



RAPAT RUTIN BERJENJANG KESEKRETARIATAN



KEGIATAN PEMBERIAN REWARD KEPADA HAKIM, PEJABAT FUNGSIONAL, ASN, HONORER DAN PETUGAS PTSP YANG BERKINERJA TERBAIK



KEGIATAN APEL PAGI RUTIN



KEGIATAN APEL SORE RUTIN



KEGIATAN SENAM JUMAT SEHAT



KEGIATAN JALAN SEHAT



KEGIATAN DONOR DARAH